

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN PREMI DALAM PROGRAM BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI  
KANTOR CABANG KABUPATEN BULUKUMBA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Pada Fakultas Syariah Dan Hukum**

**UIN Alauddin Makassar**

**Oleh :**

**NUR FAUSIA**

**NIM: 11000116034**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur fausia  
Nim : 11000116034  
Tempat/Tgl. Lahir : Sarajoko, 13 September 1997  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Andi Tonro Gowa  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban pembayaran premi Dalam Program badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Juli 2021

  
Nur fausia

NIM: 11000116034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban pembayaran premi Dalam Program badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba" yang ditulis oleh, Nama: Nur fausia, Nim: 11000116034, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 08 Februari 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 08 Februari 2021 M

9 Rabiul Akhir 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmatia HL, M.Pd
Munaqisy I	: Dr. Sohra, M.Ag
Munaqisy II	: A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing I	: Dr. H.Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

  
Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag  
NIP: 195612311987031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'Alaikum Wr.Wb*

Segala puji kehadiran Allah swt., dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta shalawat dan salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad saw., yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaannya skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam perwujudan ini, penulis memilih judul “ Tinjauan hukum islam terhadap kewajiban pembayaran premi dalam program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan di kantor cabang kabupaten Bulukumba”. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk sugesti, dan motivasi moril maupun materil. Karna itu kemudian, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada Ibunda Asniar yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik penulis hingga mampu mengenal dunia pendidikan, yang tak henti-hentinya mendampingi dan mengasihi serta tak lepas doa dan dukunganya selama penyelesaian skripsi ini. Kepada Ayahanda tercinta Usman yang senantiasa mencurahkan kasih dan

syangnya yang tak terhingga, serta menyemangati baik diwaktu kuliah sampai penyelesaian skripsi ini.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D, Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, serta para pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawan/watinya.
2. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag., selaku dekan Fakultas dan Hukum beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Ashar Sinilele, S.H., M.M., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Muhammad Anis, S.Ag, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta stafnya atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag. Selaku Pembimbing I dan Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulis skripsi.
5. Dr. Sohra, M.Ag. selaku penguji I dan A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag. selaku penguji II yang telah banyak memberikan nasehat serta saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi.
6. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

7. Kepada teman seperjuangan di Hes angkatan 2016 senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dari awal penulisan skripsi ini hingga terselesaikan.
8. Terkhusus kepada sahabatku dari maba sampai sekarang Hartalena, Riana, Isra Maudya makmur yang senantiasa bersama penulis baik suka maupun duka selama kuliah, membantu dan menemani penulis ketika butuh bantuan.
9. Terima kasih kepada kedua orang tuaku dan sahabat-sahabat terdekatku Nurpertiwi, Marlina yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian.

Akhir penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan, kesalahan, serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat di harapkan. Semoga penulis kecil ini bermanfaat bagi diri penulis Pada khususnya, dan abagi siapa saja yang ingin membacanya.

Akhirnya penulis ini menyadari bahwa sebagai hambah allah yang tidak luput dari kesalahan tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan, kesalahan, serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat di harapkan. Semoga tulisan kecil ini bermanfaat bagi diri penulis pada khususnya., dan bagi siapa saja yang ingin membacanya.

Makassar, Januari 2021

Penyusun

Nur Fausia

Nim. 11000116034

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMANA TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Kewajiban Pembayaran Premi Dalam Program BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba.....	47
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Premi (BPJS) Kesehatan Di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba.....	59

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>67</b>





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Da d	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kf	K	Ka
ل	Lm	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. *Vocal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

## C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   إ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى : *rama>\|*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### D. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-Madīnah al-Fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## ABSTRAK

**Nama : Nur Fausia**

**Nim : 11000116034**

**Judul : Tinjauan hukum islam terhadap kewajiban pembayaran premi dalam program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Di kantor Cabang Kabupaten Bulukumba**

---

Pokok masalah penelitian adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kewajiban pembayaran premi dalam program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor cabang Kabupaten Bulukumba. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana ketentuan kewajiban pembayaran premi BPJS Kesehatan di kantor cabang Kabupaten Bulukumba. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan kewajiban pembayaran premi oleh peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Kabupaten Bulukumba?.

Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis yang didukung dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian adalah kepala cabang BPJS Kesehatan Bulukumba. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan analisis data terdapat tiga tahapan: pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap kewajiban pembayaran premi dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Di kantor cabang kabupaten Bulukumba mengandung ketidakjelasan (gharar) yang terletak pada tidak jelasnya akad yang digunakan kepada para peserta, yang dimana jika yang menjadi penanggung dan bertanggung adalah sesama peserta, maka yang terjadi adalah akad tabarru" (hibah/tolong menolong), selain itu MUI juga menimbang bahwa ada tiga unsur pelanggaran dalam BPJS pertama, gharar (ketidak jelasan) bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan. Kedua, mukhatharah (untung-untungan), yang berdampak pada unsur maisir (judi) dan ketiga Riba fadhl (kelebihan antara yang diterima & yang dibayarkan). Termasuk denda karena keterlambatan.

Implikasi dari peneitian ini adalah BPJS Kesehatan harus memperhatikan harus mutu kualitas pelayanan jaminan yang diberikan kepada peserta sebagai hak mereka, termasuk didalamnya memberikan penjelasan mengenai informasi terkait program-program BPJS hak dan kewajiban BPJS dan peserta, serta alur jaminan yang diberikan agar terjadi kesalah pahaman.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Asuransi merupakan bisnis yang sangat unik, didalamnya terhadap berbagai aspek, diantaranya aspek ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika. Dilihat dari aspek ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkannya ketidakpastian kepada hal yang bersifat finansial. Dilihat dari aspek hukum, asuransi yaitu suatu kontrak pertanggungan risiko antara tertanggung. Dari aspek bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/ menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko diantaranya sejumlah nasabahnya. Dari segi sosial, asuransi merupakan organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam padangan matematik, asuransi merupakan aplikasi matematik dalam memperhitungkan biaya dan faeda pertanggungan risiko.<sup>1</sup>

Menurut Firdaus, asuransi disebut juga *takaful*, *ta'min* atau *tadhaman*, yaitu suatu usaha saling melindungi dan tolong menolong sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru “malalui akad sesuai dengan syariah”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H.abdul manan, *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama* (Jakarta:Kharisma putra utama, 2016) hal.239

<sup>2</sup> HJ. Ahkam Mujahidin, *Hukum perbangkan syariah* ( Depok: PT Raja Grfindo persada, 2015) h. 104

Dalam undang-undang BPJS sendiri mempunyai tujuan untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat dan berperinsip gotong- royong untuk saling membantu rakyat satu sama lain. Ketika melihat hal tersebut, BPJS mempunyai tugas yang sangat penting dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Dalam UU SJSN dan UU BPJS hanya membuat hal-hal tersebut. Dalam UU SJSN dan UU BPJS hanya membuat hal-hal yang umum saja, tanpa adanya aturan teknis dan prosedur praktis menjalankan BPJS.

Sesuai peraturan presiden nomor 111 tahun 2013 pasal 2, jenis iuran dibagi menjadi PBI (peserta bantuan iuran), non-PBI dan mandiri atau perorangan dan iuran ini dibayarkan dibayarkan Paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Iuran untuk orang miskin dibayarkan oleh pemerintah dan mereka disebut penerima bantuan iuran (PBI) atas nama hak sosial rakyat, tetapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat melainkan kepada pihak ketiga yaitu BPJS yang berasal dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak artinya adalah rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan mereka dan sesama rakyat lainnya.

Masyarakat yang mengalami keterlambatan membayar premi atau iuran perbulan yang telah ditetapkan akan dikenakan denda paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Hal tersebut telah diubah dan terdapat peraturan presiden (perpres) no. 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Aturan baru tersebut mengatur jika peserta menunggak membayar iuran 1 (satu) bulan, maka statusnya akan langsung dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem. Untuk mengaktifkan maka peserta harus membayar iuran tertunggaknya terlebih dahulu. Kini peserta tidak

dikenakan denda keterlambatan, namun peserta akan dikenakan denda jika dalam 45 hari sejak kartu bpjs diaktifkan kembali menggunakan kartu BPJS nya yang menjalani rawat inap. Dendanya berupa membayar biaya pengobatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali biaya rawat inap dan dikalikan lagi dengan jumlah bulan yang ditunggak. Khusus peserta PBI akan dibayarkan pemerintah dan untuk badan usaha dibayarkan oleh pemberi kerja dan untuk peserta yang tidak mampu untuk dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Besaran iuran jaminan kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan peraturan presiden. Berbeda dari hal tersebut, dalam konstitusi negara menjamin layanan kesehatan dan sosial lainnya.

Setelah terdaftar sebagai peserta BPJS, kewajiban harus dipenuhi oleh peserta BPJS adalah membayar iuran. UU SJSN dan UU BPJS menganut sebuah teori yang mengatakan bahwa: “seseorang disebut sebagai peserta apa bila membayar iuran.” Pasal 19 ayat 1 (UU BPJS) menyatakan bahwa pemberi kerja wajib memungut iuran namun jadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. Selain memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya, pemberi wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Penetapan besaran presentase pungutan iuran yang menjadi beban peserta dari Pekerja dan persentase pungutan iuran yang menjadi beban pemberi kerja ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada ketentuan pasal 19 ayat 5 UU BPJS, besaran dan tatacara pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam peraturan Presiden, sedangkan pembayaran iuran selain program jaminan



kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah bagi peserta yang bukan peserta dan bukan penerima bantuan iuran wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Adapun tentang prosedur pembayaran iuran bagi peserta penerima bantuan iuran, pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk penerima bantuan iuran kepada BPJS.<sup>3</sup>

Kemudian bagaimana melihat badan penyelenggara jaminan sosial dikelola, terutama menyangkut dananya serta bekerja sama yang dilakukan dengan perusahaan-perusahaan konvensional yang sistemnya masih tidak sesuai dengan aturan syariah. Jaminan kesehatan yang seharusnya menjadi alternatif dari permasalahan sosial masih memiliki permasalahan tersendiri yang lebih penting karena menyangkut hukum dari penggunaan asuransi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran premi dalam program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba”**.

#### ***B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus***

Fokus penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Premi Dalam Program Badan

---

<sup>3</sup> Andika wijaya, *Hukum jaminan sosial Indonesia*, (Jakarta Timur, sinar grafika, 2018), h.26-27

<sup>4</sup> Iin Iriyani Umrohadinata, *Tinjauan Hukum Islam Tentang sistem pembayaran premi dan pengelolaan dana oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJSN Kesehatan)*, Makassar: h. 6

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba.

## 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah biasa disebut juga syariah Islam dimana didalam bahasa arab syariah Islamiah jika diartikan secara etimologi berarti “jalan-jalan yang biasa ditempuh air”. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam. Hukum Islam biasa juga diartikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah allah yang mengataur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.<sup>5</sup> Dengan demikian Hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang di ambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam empat produk, yaitu: fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan perundang- undangan.<sup>6</sup>

## 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pengertian badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU NO.24 Tahun 2011). (BPJS) terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan kesehatan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rohidin, *pengantar hukum islam* (yogyakarta: redaksi, lampung, 2016) h.1

<sup>6</sup> Supardi, *Fikih Peradilan di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu* ( Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2014 ), h. 37.

<sup>7</sup> Prmata hastuti, *Asuransi konvensional syariah BPJS*(yogyakarta:prama publishing, 2016) h. 163

### 3. Premi

Premi adalah upah untuk asuransi atau harga yang dipungut oleh pihak penjamin agar dapat melaksanakan kewajibanya.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Premi Dalam Program (BPJS) Kesehatan Di di kantor cabang kabupaten bulukumba. Pembahasan selanjutnya yang akan dilanjutkan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah peneliti angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan kewajiban pembayaran premi BPJS Kesehatan dikantor cabang kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan kewajiban pembayaran premi oleh peserta BPJS Kesehatan dikantor cabang kabupaten Bulukumba?

#### D. Kajian pustaka

1. Iryani Umrohadinata, *Tinjauan hukum Islam tentang sistem pembayaran premi dan pengelolaan dana oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan)*, tahun 2016. Skripsi ini menjelaskan sistem pembayaran BPJS , dijelaskan bagaimana jika masyarakat terlambat membayar iuran BPJS.
2. Andika wijaya, S.H. hukum jaminan sosial indonesia. Dalam buku ini jelaskan tentang program asuransi sosial yang diselenggarakan. Kemudian

penelitian akan menjelaskan mengenai peroses jaminan sosial yang diselenggarakan.

3. Mohammad Edris, 2016, skripsi “Analisis Operasional BPJS Kesehatan Terhadap prinsip Ekonomi Syariah”. Dalam skripsi ini Penulis berpandangan bahwa program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah dalam hal jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum yang bersifat nirbala.
4. R. Permata hastuti A. Asuransi konvensional, syariah & BPJS .Dalam buku ini dijelaskan tentang perkembangan asuransi sangat pesat. Sementara peneliti akan membahas secara detail mengenai asuransi konvensional syariah serta BPJS yang akhir-akhir ini hangat diperbincangan.

#### ***E. Tujuan penelitian***

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan kewajiban pembayaran premi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS Kesehatan) dikantor cabang kabupaten bulukumba.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terkait dengan kewajiban pembayaran premi oleh peserta dalam badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS Kesehatan) dikantor cabang kabupaten bulukumba.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial***

##### ***Kesehatan (BPJS)***

##### **1. Sejarah BPJS**

Pada tanggal 19 Oktober 2004, Presiden Megawati mengesahkan UU No.40 / 2004 tentang sistem sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh UUD tahun 1945 dan perubahannya tahun 2002 dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28 H ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, serta pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 mengamatkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Hingga di sahkanlah dan di undangkan UU SJSN yang telah melalui proses yang panjang dari tahun 2000 hingga tanggal 19 oktober 2004.

Diawali dengan sidang tahunan MPR RI tahun 2000, dimana presiden Abdul Rahman Wahid menyatakan tentang pengembangan konsep SJSN presiden Abdul Rahman Wahid menyatakan tentang pengembangan konsep SJSN. Pernyataan presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang undang-undang jaminan sosial ( UU JS ) oleh kantor menko kesra kep. Menko kesra dan taksir No. 25 KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 agustus 2000, tantang pembentukan tim penyempurnaan sistem jaminan sosial nasional. Sejalan dengan pernyataan presiden, DPA RI melalui pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 oktober 2000, menyatakan perlu segera dibantuk badan penyelenggara jaminan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

## 2. Pengertian BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum public yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>1</sup> Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuranya dibayar oleh pemerintah. Adapun BPJS ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Sedangkan BPJS dalam pegoprasianya dilandasi dengan undang- undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52.

Program BPJS adalah bentuk dari perwujudan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Sementara pengertian program JKN adalah program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong-royong wajib oleh seluruh penduduk indonesia dengan membayar iuran berkala atau iuranya dibayari oleh pemerintah No. 101 Tahun 2021 tentang PBI

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan RI, 2013. Hlm.3

jaminan kesehatan 49 dan perpres No. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.<sup>2</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Kesehatan (BPJS Kesehatan) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Usaha kearah itu telah dirintis sebelumnya oleh pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, di antaranya adalah melalui PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).<sup>94</sup> Disebabkan hal yang sulit dikendalikan pada jaminan sosial tersebut maka, Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jaminan Kesehatan Nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam bab ketentuan umum mengenai Jaminan Kesehatan, bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Pasal 19 (1).

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Dalam Naskah Akademik SJSN, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah suatu program pemerintah dan masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 menetapkan, bahwa Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan yang beroperasi pada 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain : Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013.98 Berdasarkan hal itu, maka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Sistem Jaminan Sosial ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang



Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 5 Jenis program jaminan sosial dalam SJSN adalah :

a. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Program diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

b. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.

### c. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran.

### d. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:

- 1) Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
- 2) Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;

- 3) Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
- 4) Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
- 5) Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu.

e. Jaminan Kematian.

Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu.

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah***

### **1. Pengertian Asuransi**

Dalam bahasa Belanda ,kata asuransi disebut *assurantie* yang terdiri dari asal kata “ *assaradeur*” yang berarti penanggung dan “*sureede*” yang berarti bertanggung, kemudian dalam bahasa Prancis disebut “ *assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Adapun dalam bahasa Latin disebut “*assecurare*” yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “ *insurance*” yang berarti menanggung sesuatu

yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan assurance yang berarti menanggung sesuatu yang berarti terjadi.<sup>3</sup>

Asuransi pada masa Rasulullah Saw. dan tabiin belum dikenal, didunia barat seperti Romawi muncul asuransi laut pada abad ke dua. Di Indonesia asuransi berdasarkan prinsip syariah dibutuhkan setelah undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan.

Asuransi syariah di Indonesia, sejak mulai dikembangkan tahun 1994, belum mengalami perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan asuransi syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan asuransi syariah dari waktu ke waktu belum mampu mengejar apalagi menyamain asuransi konvensional. Pada hal kehadiran asuransi syariah cukup mendapat respon positif dari masyarakat, bukan hanya oleh masyarakat muslim, tetapi juga oleh non muslim. Dengan demikian, sejatinya asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat.<sup>4</sup>

Pengertian Asuransi berdasarkan undang-undang No.2 tahun 1992 adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu

---

<sup>3</sup> Nurul Hudan & Mohammad Heykal, *lembaga keuangan islam* ( Jakarta : PT Fajar interpratama mandiri , 2015) h. 151

<sup>4</sup> Hadi Daeng Mapuna, *Asuransi Jiwa Syariah konsep dan sistem oprasionalnya* : Al Risalah: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 19, No 1 , <http://scholar.google.co.id/>. 20019

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.

Menurut Heri sudarsono, setidaknya ada tiga unsur dalam pengertian asuransi, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Bahaya yang dipertanggungkan;
- b. Premi pertanggungkan;
- c. Sejumlah uang ganti rugi.

Menurut Muhammad firdaus, asuransi disebut juga takaful, ta'min atau tadhaman, yaitu suatu usah saling melindungi dan tolong menolong sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' melalui akad sesuai dengan syariah.<sup>6</sup>

Kajian asuransi dalam hukum islam merupakan hal yang baru dan belum pernah ditemukan dalam literatur- literatur fikih klasik, sehingga asuransi sendiri menurut pandangan hukum Islam termasuk masalah ijtihadi. Asuransi juga bertujuan untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan.<sup>7</sup> Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan takaful, ta'min dan islamic insurance. Takaful berarti saling menanggung antara umat manusia sebagai makhluk sosial. At- ta'min berasal dari kata, amanah yang berarti memberikan perlindungan,

---

<sup>5</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017) h. 104

<sup>6</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 104.

<sup>7</sup> Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, h. 3

kata aman serta bebas dari rasa takut. Adapun islamic insurance mengandung makna, pertanggungan atau saling menanggung.<sup>8</sup>

Asuransi syariah dalam pengelolaannya tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian atau spekulasi) dan maysir (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, garar, maysir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah, dan inilah yang menjadi identitas sebagai pembeda dengan asuransi konvensional.<sup>9</sup>

## 2. Dasar hukum Asuransi

### a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum Asuransi dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa surah , diantaranya:

#### 1). Q.S. Al-Hasyr/59 :18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 243.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 2.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 437.

## 2). Q.S. Al-Baqarah/2:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

menghendaki Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak kesukaran bagimu.<sup>11</sup>

## 3). Q.S. Al-Baqarah/2: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

Terjemahnya:

ketika Ibrahim berdo'a, "Ya Tuhanku jadikanlah )Dan )ingatlah" ( negeri mekkah ) ini negeri yang aman sentosa.<sup>12</sup>

## 4). Q.S Quraisy/4: 106

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Terjemahnya:

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.<sup>13</sup>

## b. Dasar hukum Al-Hadist

Melalui prinsip ketauhidan (ke esahan Allah Swt), kehidupan sosial ekonomi dibangun dalam satu kesatuan dan kebersamaan. Rasulullah saw. Mengibaratkan bahwa interaksi sosial masyarakat muslim sebagai satu tugu yang sangat sensitif terhadap seluruh resiko walaupun sekecil apapun derita salah satu bagian organ tubuh akan dirasakan oleh seluruh organ tubuh. Rasulullah Saw. Memberikan perumpamaan dalam sebuah hadis yang artinya:

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 22.

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 15.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 483.

Dari Al-Nu'man Rasulullah Saw. Bersabda ; perumpaan persaudaraan kaum muslim dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh, bila mana salah satu bagian tubuh merasakan sakit makan akan dirasakan bagian tubuh lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam (HR. Muslim ).

Berdasarkan kedekatan hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain, maka tanggung jawab sosial kehidupan setiap muslim adalah selain memelihara hubungan yang damai dan harmonis dan juga berkewajiban membantu kesulitan hidup yang dihadapi sesama.<sup>14</sup>

#### 1). Hadist Aqila

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمْتُ أَحَدَاهُمَا الْآخَرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ص , فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا .

Terjemahannya:

“Diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada nabi Muhammad saw., maka Rasulullah saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh ‘āqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhārī).<sup>15</sup>

#### 2). Hadist tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

<sup>14</sup> Urbanus Uma Leu, Asuransi Syariah kontemporer , ( Makassar : Alauddin University Press , 2014 ) h. 29-34

<sup>15</sup> Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Dar al-Fikr, 1994), Juz 8 kitab diyat, No. 6910, h. 59.



حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرَاتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Terjemahanya:

Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.<sup>16</sup>

3). Hadist tentang membantu kesulitan sesama muslim dan menuntut ilmu jalan menuju surga

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ

<sup>16</sup> Imam Bukhari, Sahih Bukhari, (tt: Dar al-Fikr, 1994), Kitab al-Faraid, Jilid, 8, h. 6.

كُرِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ  
فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ  
فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي  
بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ  
عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ  
اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.”<sup>17</sup>

#### c. Sifat Asuransi

Kita akan memahami ciri-ciri asuransi yang dipraktekkan oleh berbagai kelompok orang Arab dengan lebih jelas seandainya nkita menganalisis adat kuno yang berkenaan dengan uang tebusan darah. Tujuan asuransi seperti yang dijelaskan diatas adalah sebagai persiapan untuk menghadapi bahaya oleh sekelompok orang yang mempunyai tanggung jawab

<sup>17</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, (ttp: Maktabah Syamilah), Kitab ad-Dzikru wa al-Du’a wa at-Taubah, Juz 8, h. 71.

bersama. Cara-cara untuk melindungi dari bahaya yang mungkin terjadi, biasanya dipraktekkan oleh mereka yaitu dengan menghadapi bersama serta memberi pertolongan dan menanggung kerugian itu bersama-sama untuk meringankan beban yang ditanggung oleh salah satu dari anggota kelompok itu. Hal ini bermakna bahwa kerugian yang menimpa seseorang “ akan dibagikan diatas diantara anggota kelompok itu pada keseluruhannya”.<sup>18</sup>

#### d. Prinsip Dasar Asuransi

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara kegiatan perasuransian dimanapun berada.

- 1) Insurable interest (kepentingan yang dipertanggungkan), secara sederhana insurable interest dapat dipahami bahwa orang itu akan menderita apabila yang dipertanggungkan itu terjadi. Sebagai contoh, perusahaan asuransi harta benda tentu tidak akan menjual polisnya pada bukan pemilik gedung tersebut, karena orang tadi tidak akan menerima kerugian ekonomi andai kata gedung tersebut hancur rusak terbakar. Kepentingan yang dapat dipertanggungkan dalam pandangan Mulehuddin adalah kepentingan menurut peraturan ajib dimiliki seseorang agar ia dapat mengadakan asuransi secara valid.
- 2) Utmost good faith ( kejujuran sempurna), Utmost good faith adalah bahwa kita berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai

---

<sup>18</sup> Muhammad Mulehuddin, *Asuransi dalam Islam* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2005 ) h.

segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan.

- 3) Indemnity (indemnitas), kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity atau “kontak penggantian kerugian” . penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.
- 4) (subrogasi), prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab undang-undang hukum dagang, yang berbunyi: “ apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”.
- 5) Contribution (Kontribusi), tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian pada objek yang diasuransikan maka akan otomatis akan berlaku prinsip kontribusi.
- 6) Proximate Cause (Kausa Proksimal) apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang

menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah peristiwa atau kecelakaan tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi diantaranya:<sup>20</sup>

#### 1) Asuransi kerugian

Yaitu asuransi perjanjian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa.

#### 2) Asuransi jiwa

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan.

#### 3) Reauransi

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/ atau perusahaan asuransi.

### 4. Akad-akad dalam asuransi syariah

#### a. Akad dalam asuransi syariah

---

<sup>19</sup> Hasan Ali , *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2004) h. 77-83

<sup>20</sup> Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia* ( Jakarta : Prenamedia Group, 2015) h. 85

Akad yang dilakukan para peserta asuransi syariah merupakan akad *tijarah* dan akad *tabaru*. Akad *tijarah* merupakan akad *mudarabah*, dan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Di dalam akad harus disebutkan:

- 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
  - 2) Tata cara dan waktu pembayaran
- b. Kedudukan para pihak (peserta dan perusahaan dalam hal ini)

Dalam akad *tijarah* dan akad *tabaru'*:<sup>21</sup>

- 1) Dalam akad *tijarah* / *mudharabah*, perusahaan berkedudukan sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta berkedudukan sebagai pemegang polis (*shahibul*).
- 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan *hibah* kepada peserta yang mengalami musibah, dan perusahaan sebagai pengelola dana *hibah* tersebut.
- 3) Ketentuan akad *Tijarah* dan akad *Tabarru'*.

## 5. Mekanisme pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Premi asuransi adalah sejumlah dana yang disetor bertanggung kepada penanggung, dimana jika premi belum dibayar (lunas), maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi kalau timbul risiko. Pengelolaan dana dalam asuransi syariah adalah seluruh premi yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam rekening “Derma” yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta. Besarnya nominal premi yang disetor tergantung pada jenis asuransi yang dipilih. Kemudian uang angsuran

---

<sup>21</sup>Eko siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam dalam perspektif masalahat* (Makassar : Alauddin University press, 2012) h.104-105

premi asuransi yang disetor akan dimasukkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk diinvestasikan pada proyek-proyek atau pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dimasukkan kembali ke dalam “kumpulan dana peserta”<sup>22</sup>

a. Takaful Keluarga

Pengelolaan dana asuransi syariah pada Takaful keluarga premi yang dibayarkan oleh peserta dipisahkan dalam dua rekening, yaitu:

1. Rekening dana *tabarru'*, yaitu rekening yang niatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang di takdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.<sup>23</sup>
2. Rekening tabungan peserta (*saving*), yaitu dana yang merupakan milik peserta dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

Kontribusi/premi takaful bisa diangsur secara bulanan, seperempat tahunan, setengah tahunan, atau tahunan. Jumlah angsuran minimal ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak. Jadwal angsuran dan jumlah pertanggungan.<sup>24</sup> Sistem ini merupakan realisasi dari akad *takfulli* dan akad *mudhrabah*, agar asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta diinvestasikan ke dalam pembiayaan proyek yang dibenarkan oleh syariah. Keuntungan yang

<sup>22</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah* (Jakarta, 2015), hlm. 43

<sup>23</sup> Nopriansyah Op.cit. hlm. 74.

<sup>24</sup> Wirdyaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta, 2006), hlm.



diperoleh dari investasi, setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagikan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) sesuai dengan kesepakatan bersama. Persentase bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan akad kerja sama antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi, misalnya 70 : 30, artinya 70% dari keuntungan untuk peserta asuransi, 30% untuk perusahaan asuransi dan seterusnya . bagian keuntungan milik peserta asuransi sebesar 70% akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan derma secara proporsional. Bagian keuntungan milik perusahaan asuransi sebesar 30% akan di gunakan untuk membiayai oprasional perusahaan.<sup>25</sup>

#### b. Takaful Umum

Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan derma/*tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.<sup>26</sup>

Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiyaan-pembiyaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, premi asuransi). Apabila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagaian keuntungan miliki

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Syariah* (Bandung, 2006), hlm. 278.

<sup>26</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta, 2007), hlm. 155.



peserta kan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan, bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai oprasional perusahaan.<sup>27</sup>

## 6. Perbedaan Asuransi Komersial dan Asuransi Syariah

Perbedaan yang utama di antara keduanya terletak pada pengelolaan dan penyalagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim.

Perbedaan antara asuransi komersial dan asuransi syariah dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>28</sup>

Asuransi syariah	Asuransi komersial
Asuransi <i>Takaful</i> akadnya adalah hibah. Dan keberadaan <i>gharar</i> dalam akad hibah dibolehkan	Akadnyatukar-menukar ( <i>mu''awadhah</i> ). Maka keberadaan <i>gharar</i> pada akad ini hukumnya haram.
Perusahaan pengelola asuransi syariah statusnya adalah wakil dari para pemegang polis.	Perusahaan asuransi komersial statusnya adalah pemilik dana.
Perusahaan pengelola asuransi syariah bukanlah pemilik premi yang dikumpulkan dari para peserta.	premi yang dikumpulkan dari pihak tertanggung merupakan milik perusahaan asuransi sebagai imbalan esiapan menanggung ganti rugi atas

<sup>27</sup> Ibid.,

<sup>28</sup> Ibid. Hlm 152.

	risiko yang diasuransikan.
--	----------------------------

Sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung dan biaya operasional, milik pemegang polis bukan perusahaan asuransi.	Sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung merupakan laba milik perusahaan.
Laba dari investasi dana yang tersimpan dipotong persen bagi hasil untuk perusahaan pengelola dikembalikan kepada pemegang polis sebagai.	Keuntungan dari dana yang dikembalikan dimiliki penuh oleh perusahaan asuransi.
Tujuannya tolong-menolong antar sesama.	Tujuan asuransi komersial adalah perolehan laba.

### ***C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam***

#### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>29</sup> konsepsi hukum Islam dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum moderen. Dalam Islam, hukum di pandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu ilahi. Oleh karena itu ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan allah untuk manusia.<sup>30</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama , selain jinayat ( hukum Islam ). Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.<sup>31</sup>

Secara garis besarnya, hukum Islam meliputi empat bidang, yaitu: pertama, bidang ibadah, yakni merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Allah swt. Kedua, bidang munakahat, merupakan penataan hubungan antara manusia dengan lingkungan keluarga. Ketiga, bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antara manusia dengan pergaulan hidup masyarakat.<sup>4</sup> Sedangkan menurut A. Jazuli, hukum Islam meliputi: bidang ibadah, bidang ahwal alSyakhsiyyah (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan

---

<sup>29</sup> Muhammad daud ali, *Hukum Islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di indonesia* (jakarta , 2012 ), hal. 42t

<sup>30</sup> Syamsul anwar, *hukum perjanjian syariah studi- tentang teori akad dalam fikih-muamalat* (jakarta, 2007

<sup>31</sup> Departemen pendidikan nasional , *kamus besar bahasa indonesia* , edisi ketiga( Cet 1: Jakarta , balai pustaka , 2001), h.411

wakaf), bidang muamalah (dalam arti sempit), bidang jinayah, bidang aqdhiiyah (peradilan), dan bidang siyasah (dusturiyah, maliyah, dan dauliyah).<sup>32</sup>

## 2. Tujuan Hukum Islam

Tujuan pembuat syariat ( syari') dalam pembentukan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia guna menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap manusia. Jadi, setiap syara' tidak memiliki tujuan melainkan salah satu diantara tiga unsur tersebut. Dari tiga unsur itu dapat dibuktikan kemaslahatan manusia. Tahsiniyah tidak berarti dipelihara jika dalam peliharaannya itu terdapat kerusakan bagi hajiyyah, juga tahsiniyah tidak berarti dipelihara jika dalam peliharaan salah satunya dapat kerusakan bagi dahruriyah.

Kaidah pertama ini menjelaskan tujuan umum syariat dalam pembentukan hukum syara' baik hukum itu bersifat taklifi ( pembebanan yang wajib) atau wadh' ( pasitif, buatan manusia ) dan menjelaskan juga tingkatan-tingkatan hukum menurut tujuannya. Mengetahui tujuan umum syari' ( Allah ) dalam pembentukan hukumnya adalah termasuk suatu yang amat penting yang dijadikan alat penolong mengetahui dengan jelas nas-nas pembentukan hukum itu. Dan untuk menerapkan nas-nas itu terhadap berbagai peristiwa disamping

---

<sup>32</sup> A. Intan cahyani, Pembaharuan hukum dalam kompilasi Hukum islam: Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, volume 5, No 2, <http://scholar.google.co.id/>, 2016

itu juga untuk mengistibahkan hukum dalam peristiwa yang tidak ada nasnya.

33

### 3. Istilah-Istilah Dalam Hukum Islam

#### a. Syari'ah

Secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air. Dalam pemakaiannya, syariah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan.

Menurut istilah, perkataan syariah pada mulanya mempunyai arti yang luas, tidak hanya berarti fiqh dan hukum, tetapi mencakup pula aqidah dan segala yang diperintahkan Allah swt. dengan demikian, syariah mengandung arti mengesakan Allah swt. menaatinya, beriman kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya dan hari pembalasan.<sup>34</sup>

#### b. Fikih

Fiqh Islam secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil *naqli* berupa Al-Qur'an dan Hadis, dan dalil *aqli* berupa akal atau (*Ijtihad*).<sup>35</sup>

Kata ‘Fikih’ berasal dari kata Arab al-fiqh berarti mengerti, tahu atau paham. Sebagai istilah, fikih dipakai dalam dua arti : dalam arti ilmu hukum (*yurisprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*).

Dalam arti pertama fikih adalah ilmu hukum islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah

---

<sup>33</sup>Eko siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam dalam perspektif masalahat* ( Makassar : Alauddin university press , 2012) h. 104-105

<sup>34</sup>Hasibuddin dan Akil, *Materi Kuliah Syariah* (Makassar ,2013) h.1

<sup>35</sup>Muhamad, *Sistem Keuangan Islam* (Depok: Rajawali Pers,2019) h. 48

laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, Dalam pengertian kedua fikih adalah hukum islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syara' yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung didalam al-quran dan sunnah nabi Saw. maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum islam dan fuqaha terhadap kedua sumber tadi.

#### c. Hukum Syar'i

Hukum Syar'i ( Hukum syara'), hukum syariah secara harfiah berarti ketentuan norma atau peraturan hukum islam, dan merupakan satuan dari syariah. Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini membentuk syariah dalam arti sempit atau fikih (dalam arti hukum islam) seperti dijelaskan diatas.<sup>36</sup>

#### d. Qanun

Qanun dasarnya adalah ra'yu (produk manusia) yang dibuatnya berdasarkan ikut campurnya kekuasaan Negara. Qanun merupakan hukum yang dibuatnya dengan ikut campurnya kekuasaan Negara dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu, misalnya qanun muamalah, qanun ahwalusy-syah-siyah, qanun jinayah, dan sebagainya. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa diperuntukkan untuk masyarakat, atau untuk menata yang betul segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h.4-6

#### 4. Ciri-ciri hukum Islam

Adapun ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam
- b. Mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau aqidah dan kesusilaan atau akhlak Islam
- c. mempunyai dua istilah kunci yaitu , syariat dan fiqh .
- d. Terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadah dan muamalah
- e. Strukturnya berlapis
- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala
- g. Dapat dibagi menjadi hukum *taklifi* dan *wadh'i*
- h. Berwatak Universal
- i. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmanis serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara menyeluruh.
- j. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.

#### 5. Prinsip Hukum Islam

Sesuai dengan sunnah yang menyebabkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil-alamin), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam masa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat cukupan yang begitu luas dan elastis untuk segala zaman dan tempat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 58-59

<sup>38</sup> Abd. Shomad, *penormaan prinsip syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: kharisma putra utama, 2017) h.55

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya mengalalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosial.<sup>1</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif maka tentunya penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di kabupaten Bulukumba

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam penelitian ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu :

##### **a. Pendekatan Yuridis Normatif**

Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan menganalisa pasal-pasal didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan (*problem*). Analisis pasal ini dimaksudkan untuk melihat substansial aturan yang ada regulasi dengan kenyataan yang ada dimasyarakat

##### **b. Pendekatan Teologis Normatif**

---

<sup>1</sup> Sudaryono, *Metodologi penelitian* ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017 ) h. 91.



Pendekatan teologis normatif berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan keagamaan dengan melandaskan pada sumber-sumber hukum islam. Pendekatan ini dirangkai dengan melihat permasalahan yang ada dan menariknya kedalam perspektif hukum sesuai dengan sumber hukum islam.

### ***C. Sumber Data***

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data pokok untuk mendapatkan data. Data pokok ini diambil dan dikumpulkan dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau interview pada masyarakat guna memperoleh informasi tentang Tinjauan Hukum Islam tentang kewajiban pembayaran premi dalam program Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Dikantor Cabang kabupaten Bulukumba

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari beberapa kajian pustaka berupa buku, jurnal dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

### **1. Observasi atau Pengamatan**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan manusia dengan menggunakan panca indra, mata sebagai alat bantu utama selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.

### **2. Wawancara atau Interview**

Wawancara merupakan metode utama yang didalam mengumpulkan data kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai yaitu masyarakat yang melakukan sistem pembayaran premi dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>2</sup>

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi atau metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumenter dilakukan dengan pengambilan gambar selama proses penelitian berlangsung.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi peneliti sendiri, pedoman wawancara yang berfungsi sebagai pengarah dalam memperoleh data

---

<sup>2</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, ( Jakarta: Kencana Prenada media group , 2008 )  
h. 108

dari informan secara sistematis, pedoman observasi berfungsi sebagai pengarah jalannya observasi sehingga penelitian bisa tepat sasaran, dan kamera atau *tape recorder* sebagai instrumen yang berfungsi untuk menyimpan bahan penelitian atau observasi sebelum dicatat dalam hasil penelitian.

## ***F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data***

### **1. Teknik Pengelolaan**

Editing adalah kegiatan untuk memeriksa data mentah yang telah dikumpulkan, meliputi melengkapi data yang kurang atau kosong, memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangjelasan dari pencatat data, memeriksa konsistensi data sesuai dengan data yang diinginkan, memeriksa keseragaman hasil pengukuran (misalnya keseragaman satuan) dan memeriksa reliabilitas data (misalnya membuang data-data yang ekstrim).

### **2. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, penyusunan dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

#### **a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Yaitu penyederhanaan, pengabstrakan, pemilihan, dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan

integral.<sup>3</sup> Data reduksi intinya mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses kelangkah berikutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan untuk memaknainya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah sebelumnya dilakukan reduksi dan penyaian data, yang menjelaskan alur sebab akibat suatu fenomena dan nouma terjadi.

**G. Pengujian Keabsahan Data**

**1. Display**

Dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan jenisnya, dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

**2. Trigulasi**

Trigulasi dalam penguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu dengan demikian terdapat regulasi sumber, tehnik kumpul data dan waktu. Trigulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.

---

<sup>3</sup> Syamsuddin , *Paradigma metode penelitian* ( Kuantitatif dan kualitatif ), Makassar: Shofia, 2016 , h.72

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba**

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 153 km dari kota makassar. Ibu Kota Kabupaten Bulukumba ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten Bulukumba ini memiliki luas wilayah 1.154, 67 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 435. 888 jiwa kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 27 Kelurahan, serta 109 Desa.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koorninator antara 5° 20° sampai 5° 40° Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah:

Sebelah Utara :Kabupaten Sinjai

Sebelah Selatan : Kabupaten selayar

Seblah Timur : Teluk Bone

Seblah Barat : Kabupaten Bantaeng

Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kaki gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industry perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambahan ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu : Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang , Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang , Kecamatan Herlang Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang di mulai dari barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian- bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale.

## **2. Gambaran Umum BPJS Kesehatan Kab. Bulukumba**

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 20011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS (BPJS) yang berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang- undang NOMOR 40 Tahun 24 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Akses dan lembaga jaminan social ketenagakerjaan PT Jamsostek.

BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba yang berlokasi di Jl. Kenari NO. 2, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Sarana Kantor

BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba terdiri dari Aset Tetap berupa tanah/ bangunan, alat angkut,an, peralatan bangunan gedung, inventaris kantor dan prangkat keras dengan total nilai asset Rp 13.099.103.057 (pencatatan imaps dan pencacatan akuntansi tanpa selisih). BPJS Kesehatan ini merupakan sala satu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang memiliki wilayah kerja Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab Jeneponto, dan Kab. Selayar.

### **3. Visi misi BPJS Kesehatan**

Visi BPJS Kesehatan yaitu: Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS yang handal, ungguldandan terpercaya.

Sedangkan Misi BPJS Kesehatan, yaitu:

- 1) Memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat
- 2) Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia
- 3) Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan.

### **4. Asas, Tujuan dan pripsip penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan)**

#### **a. Asas penyelenggaraan BPJS Kesehatan**

- 1) Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah asas yang berkaitan dengan penghargaan terhadap kemanusiaan dan memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

## 2) Manfaat

Asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurang pendapat karena menderita sakit.

## 3) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Asas ini bersifat adil. System jaminan social nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Prinsip BPJS Kesehatan menurut UU No.40 tahun 2004 tentang system jaminan social nasional, BPJS diselenggarakan berdasarkan pada 9 prinsip:

- 1) Kegotong-royongan, adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan social, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong-royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang



sakit. Melalui prinsip kegotong royongan ini , jaminan social ini menumbuhkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia .

- 2) Nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi BPJS adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dan amanat hasil pengembangannya dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
- 3) Keterbukaan, adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi peserta.
- 4) Kehati-hatian, adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
- 5) Akuntabilitas, adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- 6) Portabilitas, adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutanmeskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah NKRI.
- 7) Kepesertaan bersifat wajib, adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan social, yang dilaksanakan secara bertahap.

- 8) Amanat, prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya untuk digunakan oleh peserta jaminan social.
- 9) Hasil pengelolaan dana jaminan social dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

## **5. Tugas, fungsi dan wewenang BPJS**

### **a. Tugas BPJS Kesehatan**

Tugas tugas yang diamanatkan oleh undang-undang No.24 tahun 2011 memberikan kewenangan kepada BPJS yang salah satunya adalah membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara lengkapnya dalam UU No.24 tahun 2011 BPJS memiliki tugas, yaitu:

- 1) Melakukan dan / menerima pendaftaran peserta;
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja ;
- 3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
- 4) Mengelola dana jaminan social untuk kepentingan peserta;
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan social;
- 6) Membayarkan manfaat dan / membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan social;
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan social kepada peserta dan masyarakat;

### b. Fungsi BPJS

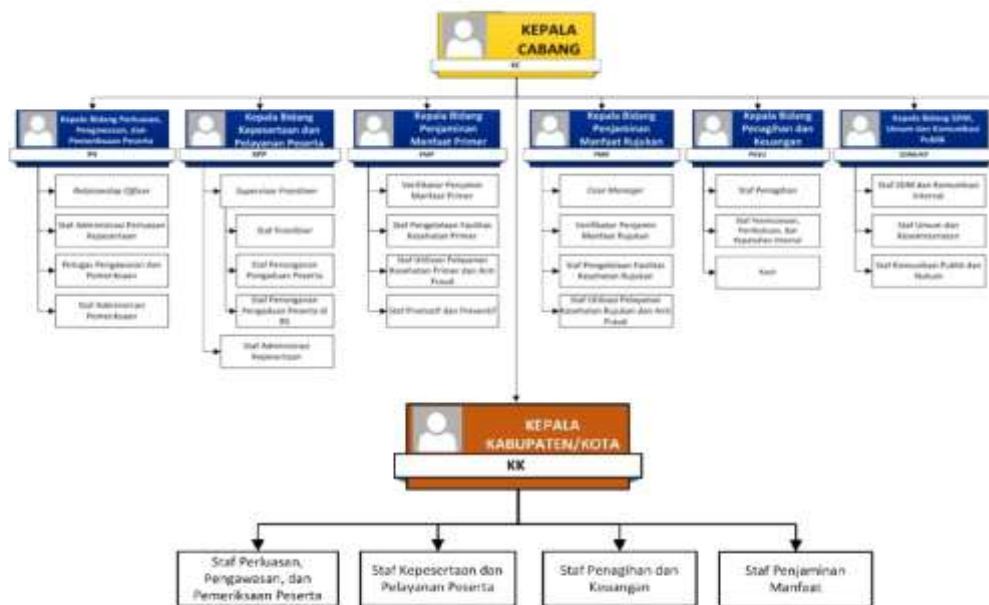
UU BPJS menentukan bahwa BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi social dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

### c. Wewenang BPJS

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, yang diatur berdasar UU No.24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan social berwenang:

- 1) Menagih pembayaran iuran
- 2) Menetapkan dana jaminan social untuk investasi jangka pendek
- 3) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan serta kepatuhan peserta
- 4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan
- 5) Membuat atau memberhentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- 6) Mengenai sanksi administrasi kepada peserta
- 7) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi
- 8) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka program jaminan social.

## 5. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bulukumba



### B. Kewajiban Pembayaran Premi Dalam Program BPJS Kesehatan Dikantor Cabang Kabupaten Bulukumba

#### a. Sistem akad dalam BPJS Kesehatan

Dalam undang-undang hanya mengatur tata cara pendaftaran di BPJS. Seperti yang tertulis dalam UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 16 ayat (1) setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti. (2) setiap orang sebagai mana di maksud pada ayat 1 wajib memberikan data mengenai dirinya dan keluarganya

secara lengkap dan benar kepada BPJS. Kemudian pada pasal 18 ayat 2 menerima bantuan iuran wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada pemerintah untuk di sampaikan kepada BPJS.

Asuransi sosial ini juga merupakan pertanggungan jawaban dari BPJS Kesehatan yang terbentuk dari orang-orang yang berserikat terhadap partisipan yang mengalami kejadian. Karena itu syarat-syarat pertanggungan (al-daman) di dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya. Syarat pertanggungan (daman) adalah:

- a) Di sana wajib ada hak yang wajib ditunaikan yang berada di dalam tanggungan, yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian perusahaan memberikan pertanggungan kepada seseorang yang mengalami kejadian. Artinya membayar konsekuensi yang muncul dari kejadian itu.
- b) Di sana harus tidak ada kompensasi, yakni penanggung tidak mengambil kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus atau partisipasi (premi).
- c) Di sana tidak boleh ada investasi harta, apalagi dengan jalan yang tidak syar'i, melalui perusahaan lain, apapun nama dan sebutannya baik disebut investasi ataupun reasuransi.
- d) Akad asuransi sosial harus merupakan akad yang syar'i dengan syarat-syarat syirkah di dalam Islam, yaitu adanya harta dan badan, bukan syirkah harta saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa dalam jaminan kesehatan ini (BPJS) mengandung ketidakjelasan (gharar) yang terletak pada tidak jelasnya akad yang digunakan kepada para peserta, yang dimana jika yang menjadi penanggung dan tertanggung adalah sesama peserta, maka yang terjadi adalah

akad tabarru" (hibah/tolong menolong). Namun, hal yang tidak sesuai dengan hibah sendiri dalam BPJS adalah tidak jelasnya pemilihan oleh peserta untuk memilih menggunakan akad tabarru" atau hibah yang dana seluruhnya untuk kepentingan peserta lain, tanpa mengharapkan kembali harta hibah itu atau memang diniatkan untuk kepentingan pribadi peserta sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, yakni dalam akad tabarru" (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah dan jika yang menjadi penanggung dan bertanggung adalah BPJS dan peserta, maka ini menyalahi prinsip dari BPJS yaitu gotong-royong dan juga BPJS menjanjikan suatu hal yang tidak pasti (pelayanan kesehatan) kepada masyarakat yang belum tentu akan sakit atau tidak (gharar). Seperti yang dijelaskan pada hadis Bukhari dan Muslim yang artinya:

"Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya". (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

Dan juga gotong royong atau ta'awun itu belum terjadi karena belum jelas ada orang kaya menolong orang miskin secara teratur dan terecana, bahkan orang kaya yang terbantu oleh uang fakir miskin. Kenyataannya semua terjadi berdasarkan spekulatif (untung-untungan/maysir/perjudian). Bahkan pada praktiknya orang kaya dibantu oleh kumpulan uang iuran orang miskin, sebab orang-orang kaya ikut BPJS bukan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi dengan untung-untungan (maysir/perjudian).

#### b. Kewajiban Pembayaran Premi

Pasal 1 ayat 13 UU No.19 tahun 2016 menyebutkan bahwa iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/ pemerintah untuk program jaminan kesehatan, terdapat juga dalam UU SJSN No.40 tahun 2004 pasal 1 ayat 3 “social adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko social ekonomi yang menimpa peserta dan / anggota keluarganya” . UU BPJS No.24 tahun 2011 pasal 14 dan 16 dan peraturan BPJS No.1 tahun 2014 pasal 26. Kemudian pada pasal 16 dibedakan 3 pembayaran iuran:

- 1) Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah. Iuran kesehatan oleh penduduk yang di daftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah.
- 2) Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja (3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta).
- 3) Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerkja dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.

Terdapat pilihan pembayaran iuran dilihat dari tingkat kelas yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang dipilih ketika akan mendaftarkan diri BPJS. Perbedaannya adalah dilihat dari besar kecilnya iuran bulan yang harus dibayar

berdasarkan perpres No.19 tahun 2019 tentang perubahan ke 2 atas perpres No.12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, menyangkut iuran BPJS yang resmi mengalami kenaikan. Untuk iuran peserta BPJS mandiri atau peserta BPJS pekerja bukan penerima upah adalah sebagai berikut.

- a) Kelas 1, iuran bulan yang harus dibayar awalnya Rp.59.500 menjadi Rp. 80.000.
- b) Kelas 2, awalnya Rp.42.500 menjadi Rp.51.000
- c) Kelas 3, Rp.25.500 menjadi Rp.30.000 (khusus kelas 3 kenaikan dibatalkan jadi tetap besarnya Rp.25.5000, sesuai diterbitkannya PP nomer 28 tahun 2016 revisi 3 atas PP No.12 tahun 2013).
- c. Hak, Kewajiban peserta BPJS dan kepesertaan yang dijamin
  - 1) Hak Peserta
    - a) Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan .
    - b) Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - c) Mendapatkan pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan.
    - d) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis melalui petuga diunit penanganan pengaduan peserta dikantor BPJS kesehatan atau BPJS center dirumah sakit yang dikantor BPJS kesehatan, website BPJS kesehatan, email, oline service dan pusat pelayanan informasi BPJS kesehatan 1500400.



## 2) Kewajiban peserta BPJS

- a) Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya, sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Memberikan data dengan benar dan dapat di pertanggungjawabkan.
- c) Melaporkan perubahan data peserta, baik karenan pernikahan, perceraian, kematian,kelahiran, perubahan jenis kepesertaan, pindah alamat, pindah fasilitas kesehatan tingkat satu, paling lambat 7 hari kerja sejak terjadinya perubahan data.
- d) Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
- e) Mentaati tata cara dan prosedur pelayanan kesehatan serta semua ketentuan yang berlaku.

## 3) kepesertaan yang dijamin

Pekerja penerima upah :

- a) pekerja penerima upah dan keluarganya meliputi pekerja penerima upah, istri/suami dan anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya lima orang.
- b) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kreteria : tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, belum berusia dua puluh tahun atau belum berusia dua puluh lima tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Perta bukan penerima bantuan iuran jamina kesehatan (non PBI) dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain, meliputi anak ke 4 dan seterusnya ayah , ibu dan mertua.

d. Iuran

- 1) Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah.
- 2) Iuran bagi peserta penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintah yang terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan : 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh pekerja.
- 3) Iuran bagi peserta penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta
- 4) Iuran untuk keluarga yang lain pekerja penerima upah yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1%, diawali dengan pemberian surat kuasa dari pekerja kepada pemberi kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran dan menyetorkan kepada BPJS Kesehatan.
- 5) Iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, serta anggota keluarga lainnya dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ ipar, asisten rumah tangga, dll); adalah sebesar:

- a) Rp. 25.500,-(dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.
- b) Rp. 51.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II
- c) Rp. 80.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas . iuran jaminan kesehatan bagi veteran, printis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau printis kemerdekaan, iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang III / a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, di bayar oleh pemerintah.
- 6) Pembayaran iuran paling lambat setiap tanggal 10 tiap bulan.

e. Peserta jaminan kesehatan

Adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi:

- 1) Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan: fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- 2) Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ( non pbi) terdiri dari:
  - a) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya yaitu PNS, TNI, POLRI, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta, dan pekerja lain menerima upah, termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan.

- b) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja lain yang bukan penerima upah, termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan.
- c) Bukan pekerja dan anggota keluarganya yaitu investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, prajurit kemerdekaan, janda, duda atau anak yatim piatu dari veteran atau prajurit kemerdekaan serta bukan pekerja lain yang mampu membayar iuran.

f. Denda/Sanksi Keterlambatan Pembayaran

- 1) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan lebih dari satu bulan sejak tanggal 10, penjamin peserta akan di berhentikan sementara.
- 2) Pemberhentian sementara penjaminan peserta akan berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila peserta:
  - a) Membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 bulan dan
  - b) Membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.
- 3) Bila dalam 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali dan peserta memanfaatkan pelayanan rawat inap, maka peserta wajib membayar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, atau maksimal Rp 30 juta kepada BPJS Kesehatan
- 4) Pembayaran denda bagi peserta pekerja penerima upah di tanggung oleh pemberi kerja, sedangkan pembayaran denda bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja di tanggung oleh peserta

BPJS kesehatan telah memberlakukan peraturan baru pada 1 juli 2016 mengenai peserta yang menunggak bayar iuran dan denda yang dulunya status akan di nonaktifkan jika terlambat 3 bulan dan dikenakan denda sebesar 2% perbulan telah dihapuskan dan telah dibentuk regulasi baru yang diatur dalam perpres No.19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perpres No.12 tahun 2013. Peraturan yang baru yakni terdapat dalam perpres No.19 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas perpres No.12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Aturan baru tersebut mengatur jika peserta menunggak membayar iuran satu bulan, maka statusnya akan di nonaktifkan secara otomatis oleh system. Untuk mengaktifkannya maka peserta harus membayar iuran tertunggaknya terlebih dahulu. Kini peserta tidak dikenakan denda keterlambatan, namun peserta akan dikenakan denda jika dalam 45 hari sejak kartu BPJS diaktifkan kembali menggunakan kartu BPJS nya yang menjalani rawat inap.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bulukumba pada tanggal 27 September 2020, mengatakan bahwa “Tidak ada denda yang diberikan oleh pihak asuransi kepada peserta BPJS jika menunggak dalam hal pembayaran. Ketika peserta BPJS melunasi tunggaknya maka kartu BPJS nya akan diaktifkan kembali”

Berdasarkan wawancara dengan pengguna BPJS Kesehatan, menyatakan bahwa:

1. Menurut pernyataan Ibu Hasnah salah satu pengguna bpjs kelas 3, yang berdomisli di Desa Tibona, Kel. Jawi-Jawi, beliau tidak melakukan pembayaran iuran selama 10 bulan dan ketika ia ingin berobat di salah

satu klinik, pihak klinik tidak memberikan pelayanan dengan alasan BPJSnya telah menunggak atau di non aktifkan oleh pihak BPJS. Oleh karena itu dia dilayani melalui jalur umum non BPJS. Pihak klinik mengarahkan Ibu Hasnah bahwa jika ingin BPJSnya di aktifkan harus melapor di BPJS Kantor Cabang dibagian pengaduan.

2. Menurut pernyataan ibu Asna Yusuf salah satu pengguna BPJS kelas 3, yang berdomisili di Lingk. Bontorihu, Kel. Ballasaraja, beliau pernah tidak melakukan pembayaran selam 2 bulan dan ketika dia ingin berobat pihak puskesmas tidak memberikan pelayanan. Dia akan dilayani setelah melakukan pembayaran iuran. Akhirnya dia membayar iuran terlebih dahulu dan pihak puskesmas pun memberikan pelayanan.

Dendanya berupa pembayaran biaya pengobatan sebesar 2,5 % dikali dengan biaya rawat inap dan dikalikan lagi dengan jumlah bulan yang ditunggak. Khusus peserta PBI akan dibayarkan pemerintah dan untuk badan usaha dibayarkan oleh pemberi kerja dan untuk peserta yang tidak mampu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Aturan sebelumnya yang mewajibkan masyarakat untuk membayar denda sebesar 2% kan bunga yang diharamkan dalam Islam sesuai ijtima “ulama” MUI, sekarang BPJS telah mengubah denda tersebut hanya bagi peserta yang menunggakkan dan sebelum 45 hari setelah diaktifkan karena melunasi tunggakan dan mendapatkan rawat inap yang akan mendapatkan denda sebesar 2,5% dengan pengaturan tersendiri.

#### g. Pengajuan klaim

Untuk klaim dalam asuransi kesehatan BPJS tidak berdasarkan berapa jumlah premi yang dibayarkan oleh peserta. Pengajuan klaim tidak dilakukan peserta langsung kepada BPJS, tetapi melalui pihak rumah sakit yang telah menghitung besaran biaya yang digunakan dalam pengobatan dan perawatan. Jadi, masyarakat tidak menerima pembayaran klaim berupa harta tetapi pelayanan kesehatan seperti yang telah dibahas di atas. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Irawati Renreng yakni: “Tidak terdapat pengajuan klaim untuk orang yang tidak menggunakan kartu BPJS Kesehatnnya. Ketika meninggal dunia, maka tidak ada pengembalian iuran kepada peserta, karena jaminan kesehatan ini bersifat tanggung-renteng dan gotong-royong. Hanya saja peserta dapat mengajukan klaim ketika ada anggota keluarga yang meninggal, lalu iuran tetap berjalan karena tidak ada laporan ke BPJS maka dapat mengajukan klaim dan ada pengembalian iuran terhitung saat bulan setelah meninggal”. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui memang tidak ada yang salah dalam pengajuan klaim selama peserta mengalami resiko, maka pelayanan kesehatan adalah pembayaran klaim yang diberikan. Hal yang tidak sesuai hanya terdapat pada janji yang diberikan ketika mendaftar yang mengatakan hanya mendapatkan pembayaran klaim jika mengalami resiko dan tidak akan mendapatkan apa-apa jika tidak ada resiko. Hal tersebut memang tidak mengapa jika merupakan hibah seperti yang dikatakan sebelumnya, namun sungguh tidak ada kejelasan (gharar) di dalamnya ketika tidak ada akad/perjanjian yang memperjelas hal tersebut. Dimana mungkin seorang peserta bukan meniatkan untuk hibah, namun karena takdir Allah kemudian meninggal dunia

tanpa menggunakan asuransi kesehatannya. Maka iuran yang selama ini dibayarkan tidaklah halal untuk digunakan karena tidak ada kejelasan dari pemegang kartunya. Artinya, iuran tersebut harus dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya karena jika tidak perbuatan tersebut menzalimi peserta dan ahli waris yang berhak menerimanya. Jika dianggap kesepakatan, tidak boleh ada kesepakatan yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sebagaimana hadis Amar bin Auf al Muzani ra. bahwasanya Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda:

“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin boleh menentukan syarat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Abu Isa berkata; hadis ini hasan shahih. (Hadis Hasan Shahih Riwayat Tirmidzi)

Hal ini dikuatkan dengan hadis Aisyah ra., Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah adalah batil, walaupun seratus syarat. (HR. Bukhari dan Muslim)

### ***C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Premi (BPJS)***

#### ***Kesehatan Di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba***

MUI menimbang adanya 3 unsur pelanggaran dalam BPJS, Pertama, gharar (ketidak jelasan) bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan. Kedua, mukhatharah (untung-untungan), yang berdampak pada unsur maisir (judi) Ketiga, Riba fadhl (kelebihan antara yang diterima & yang dibayarkan). Termasuk denda karena keterlambatan. Penjelasan lebih rincinya sebagai berikut,

1. Peserta bayar premi bulanan, namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. Bisa lebih besar, bisa kurang. Di situlah unsur gharar (ketidak



jelasan) dan untung-untungan. Ketika gharar itu sangat kecil, mungkin tidak menjadi masalah. Karena hampir dalam setiap jual beli, ada unsur gharar, meskipun sangat kecil. Dalam asuransi kesehatan BPJS, tingkatannya nasional. Artinya, perputaran uang di sana besar. Anda bisa bayangkan ketika sebagian besar WNI menjadi peserta BPJS, dana ini bisa mencapai angka triliyun. Jika dibandingkan untuk biaya pemeliharaan kesehatan warga, akan sangat jauh selisihnya. Artinya, unsur ghararnya sangat besar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan,

الْغَرَرُ بَيْعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.”

(HR. Muslim 1513).

2. secara perhitungan keuangan bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Kita tidak menyebut peserta BPJS yang sakit berarti untung, sebaliknya ketika sehat berarti rugi. Namun dalam perhitungan keuangan, yang diperoleh peserta ada 2 kemungkinan, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Sementara kesehatan peserta yang menjadi taruhannya. Jika dia sakit, dia bisa mendapatkan klaim dengan nilai yang lebih besar dari pada premi yang dia bayarkan. Karena pertimbangan ini, MUI menyebutnya, ada unsur maisir (judi).
3. ketika klaim yang diterima peserta BPJS lebih besar dari premi yg dibayarkan, berarti dia mendapat riba Fadhl. Demikian pula, ketika terjadi keterlambatan peserta dalam membayar premi, BPJS menetapkan ada denda. Dan itu juga riba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Uztadza yang bernama Ibu Nuraini mengatakan bahwa BPJS boleh digunakan dan yang penting sesuai dengan syariat Islam saling menguntungkan dan tidak merugikan misalnya itu bisa bermanfaat bagi pribadi saya dan bisa bermanfaat bagi mereka dan contoh orang yang mempunyai penyakit yang kronis tetapi kurang biayanya maka dibayai oleh BPJS maka disitu keuntungannya dan BPJS bisa bermanfaat bagi mereka dan yang diharamkan di BPJS memaksa orang untuk membayar dan itu namanya yang diharamkan karena apabila tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan denda dan solusinya itu pemerintah akan diberikan KIS (Kartu Indonesia Pintar).

Ketika hal tersebut dilihat dari kacamata Islam, yang dimana segala aspek kehidupan telah diatur agar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tak terkecuali mengenai akad pun telah diatur sedemikian rupa yang koridornya juga tidak menyalahi aturan positif dinegara ini. Saat mendaftarkan diri untuk mengikuti program jaminan kesehatan di BPJS dengan memenuhi persyaratan dia atas dianggap telah menyetujui segala ketentuan yang berlaku kemudian jika hal ini dilihat dengan mendasarkannya pada hukum Islam, dapat ditemukan hal-hal yang dapat menyesatkan masyarakat (ketidakpastian/ gharar) yang awam terhadap undang-undang dan aturan Islam dalam hal ini akad.

Dalam upaya menghindari gharar, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat se jelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan dalam kontrak asuransi syariah bila

terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau ruang lingkupkontrak itu sendiri. Maisir (perjudian) timbul karna garar. Peserta bertanggung mungkin memiliki kepentingan yang pertanggungkan, tetapi apabila perpindahan resiko berisikan elem-elem spekulasi, maka tidak perkenangkan dalam asuransi sosial. Dalam fatwa (DSN/ MUI NO 21/DSM MUI/ X/2001 jelaskan bahwa akad, sekurang kurangnya harus disebutkan:

- 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- 2) Cara dan waktu pembayaran premi
- 3) Jenis akad tijara dan atau akad tabaru serta syarat- syarat yang di sepakati,  
sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran premi diatur dalam Pasal 1 ayat 13 UU No.19 tahun 2016 menyebutkan bahwa iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/ pemerintah untuk program jaminan kesehatan, terdapat juga dalam UU SJSN No.40 tahun 2004 pasal 1 ayat 3 “social adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko social ekonomi yang menimpa peserta dan / anggota keluarganya”. UU BPJS No.24 tahun 2011 pasal 14 dan 16 dan peraturan BPJS No.1 tahun 2014 pasal 26. Kemudian pada pasal 16 dibedakan 3 pembayaran iuran.
2. Pandangan hukum islam mengenai kewajiban pembayaran premi BPJS dapat dilihat dari pernyataan MUI yang menyatakan bahwa ada 3 unsur pelanggaran dalam BPJS, Pertama, gharar (ketidak jelasan) bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan. Kedua, mukhatharah (untung-untungan), yang berdampak pada unsur maisir (judi) Ketiga, Riba fadhl (kelebihan antara yang diterima & yang dibayarkan).

**B. Implikasi**

1. BPJS Kesehatan harus memperhatikan mutu kualitas pelayanan jaminan yang diberikan kepada peserta sebagai hak mereka, termasuk didalamnya memberikan penjelasan mengenai informasi terkait program-program BPJS hak dan kewajiban BPJS dan peserta, serta alur jaminan yang diberikan agar terjadi kesalah pahaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran:

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Madkur, 1997.

### Buku:

Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ali, Muhammd Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: 2012.

Anshori, Abdul Ghofar. *Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada media group, 2008.

Cahyani Intan Andi, Pembaharuan hukum dalam kompilasi Hukum islam: Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, volume 5, No 2, <http://scholar.google.co.id/>. 2016

Danimar. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: 2007.

Dinrohi. *Pengantar Hukum Islam*. Yokyakarta: Kantor Redaksi Lampung, 2016.

Hastuti, Permata. *Asuransi konvensional syariah BPJS*. Yokyakarta: Prama Publishing, 2016.

Hudan Nurul & Heykal Mohammad. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015.

Iqbal, Muhammad. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Manan,H.Abd. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persfektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.

Mujahidin, Ahkam H. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Muslehuddin, Muhammad. *Asuransi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Mapuna Daeng Hadi, *Asuransi Jiwa Syariah konsep dan sistem oprasionalnya* : Al Risalah: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 19, No 1 , <http://scholar.google.co.id/>. 2019

Niddsumays. *Paradigma Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Makassar: Shofia, 2016.

Ningsihwirdaya, et.al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* : Jakarta, 2006.

Onoyradus. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.

Rodoni, Ahmad. *Asuransi & Pegadaian Syariah*: Jakarta, 2015.

Shomad, Abd. *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.

Siswanto, Eko. *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Masalahat*. Makassar: Alauddin University Press, 2012 .

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi- Tentang Teori Akad Dalam Fikih-Muamalat*. Jakarta, 2007.

Urbanu, Uma Leu. *Asuransi Syariah Kontenporer*. Makassar: Alauddin University Press , 2014.

### **Undang-Undang:**

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nur fausia, lahir dari suku bugis, dalam keluarga dipanggil fausia namun di kalangan sekolah maupun organisasi lebih akrab dipanggil uci, lahir di Bulukumba 13 September 1997, merupakan anak tunggal dari pasangan Usman dan Asniar penulis saat ini bertempat tinggal di sarajoko kelurahan ballasaraja. Memulai pendidikan dari bangku dasar atau disebut SD 74 Tamarellang. MTS 1 Bulukumba dan SMAN 2 Bulukumba, Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah prodi Perdata.

